

Kebijakan Politik Mustafa Kemal Ataturk terhadap Suku Kurdi di Turki 1923-1938 M

Ela Hikmah Hayati¹

Abstract

This study answered a question why Mustafa Kemal Ataturk's administration set a policy against the Kurds in Turkey in 1923-1938 M. To answer these questions, the author delves myriads of written sources using political approaches. The analysis of this study finds that the enactment of policies towards the Kurds in Turkey due to the gap ideology and religion were very strong between the Kurds and the Mustafa Kemal Ataturk's administration. That can inhibit the existence of ethnic Kurds, either in the areas of social, economic, religious, cultural or political. This study also finds when a tribe and nation hampered its existence, they would do such riots, either physical (as do the military war, war bombs) or non-physical (such as a demonstration of a written or unwritten through social media, magazines, newspapers, articles, etc.), to people in power. Thus people who mastered feel deep discrimination and consequently the controlled and controlling equally get the loss.

Keywords: *policy, politics, Mustafa Kemal Ataturk, the Kurds, Turkey*

Abstrak

Studi ini menjawab sebuah pertanyaan yaitu mengapa Pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk membuat sebuah kebijakan melawan orang-orang Kurdi di Turki pada 1923-1938 M. Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis menganalisis banyak sumber-sumber tertulis menggunakan pendekatan-pendekatan politik. Analisis dari studi ini menemukan bahwa pemberlakuan kebijakan terhadap orang-orang Kurdi di Turki terkait dengan gap ideologi dan agama sangatlah kuat antara orang-orang Kurdi dan Pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk. Hal ini bisa mengancam eksistensi etnis Kurdi, baik dalam tataran sosial, ekonomi, agama, budaya, maupun politik. Studi ini pun menemukan ketika sebuah suku dan bangsa berada di ujung tanduk, mereka akan melakukan semacam pemberontakan, baik secara fisik (perang militer, perang bom) atau non fisik (demonstrasi tertulis atau tidak tertulis lewat media sosial, majalah-majalah, Koran-koran, artikel-artikel dan lain sebagainya), kepada mereka yang sedang berkuasa. Kemudian, orang-orang yang dikuasainya merasakan adanya diskriminasi yang mendalam dan akibatnya orang yang dikuasai dan yang menguasai sama-sama mendapatkan kerugian.

Kata Kunci: *Kebijakan, politik, Mustafa Kemal Ataturk, suku Kurdi, Turki*

¹UIN Suka Yogyakarta, Interdisciplinary Islamic Studis, Sejarah Kebudayaan Islam, email : elahik-mahhayati_30@yahoo.com

A. Pendahuluan

Turki (bahasa Turki: *Türkiye*) merupakan pusat kekuasaan Islam terbesar masa Kekhalifahan Usmani pada abad ke 12 sampai abad ke 20 M (1299-1922 M).² Di akhir abad ke 18 M, Turki Usmani mengalami fase kemunduran yang diakibatkan oleh revolusi Prancis, yang terbagi menjadi beberapa wilayah diantaranya: Anatolia, Syria, Libanon, Balkan, Yordania, Irak, Kuwait, beberapa bagian Saudi Arabia, Mesir, Libya, Tunisia dan Aljazair.³

Setelah masa kemunduran Khilafah Usmani terlewati pada tahun 1922 M, kemudian Kekhalifahan Usmani mengalami fase peralihan (transisi) pada tahun 1923 M. Ketika itu (1923), Turki dinyatakan sebagai negara Republik yang telah diakui kemerdekaannya oleh masyarakat Internasional di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk,⁴ den-

²Menurut informasi yang penulis dapatkan dari sumber Syafiq A. Mughni di dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki* menjelaskan bahwa sejarah Islam Khilafah Usmani terbagi dalam lima periode diantaranya dari periode pertama sampai periode ketiga (1299-1699 M) dimulai dengan berdirinya Khilafah, kemudian kemajuan yang pesat dalam segala bidang sampai mampunya Khilafah Usmani dalam mempertahankan Kekhalifahan. Dari periode keempat sampai kelima (1699-1922 M), ditandai dengan surutnya Kekhalifahan Usmani sampai dengan kebangkitan kultural dan administrasi dari negara di bawah pengaruh ide-ide Barat. Syafiq A. Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*, Cet. I, (Jakarta: Logos, 1997), h. 54-66. Adapun faktor yang menyebabkan Khilafah Usmani mundur yaitu munculnya kekuatan baru orang Eropa yang disebabkan oleh beberapa penemuan dalam bidang teknologi dengan mendorong bangkitnya bidang ekonomi dan juga militer di Turki. *Ibid.*, h. 92-119.

³Erik J. Zürcher, *Sejarah Modern Turki*, Ed. Revisi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 3.

⁴Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, penerjemah: Ghufroon A. Mas'adi, Ed. I, (Jakar-

gan memiliki letak geografis yang strategis yaitu di antara dua benua Asia dan Eropa, yang terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara.⁵

Sejak dinyatakan kemerdekaannya Republik Turki tahun 1923 M, komposisi masyarakat Turki terdiri atas berbagai macam suku⁶, agama, dan budaya yang heterogen. Dari masing-masing suku, budaya, agama memiliki peranannya dalam melancarkan sistem birokrat yang di pimpin oleh Presiden Mustafa Kemal Atatürk, salah satu suku yang paling berperan penting didalamnya yaitu suku Kurdi. Suku Kurdi memiliki hubungan baik dengan Mustafa Kemal Atatürk yaitu membantu mengerahkan seluruh balatentara Kurdi guna mencegah sekutu (Inggris, Prancis, Yunani, dan Rusia) menjajah tanah air mereka dengan melakukan penyerangan di bawah kendali Mustafa Kemal Atatürk.⁷

ta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), Cet I, h. 88. R. R. Kasliwal, *The Foreign Policy Of Turkey Since 1919*, The Indian Journal of Political Science, Vol. 7, No. 1-2, (Indian Political Science Association, 1945), h. 390, diakses: 17/09/2014 23:46.

⁵Feroz Ahmad, "Turki" *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, John L. Esposito; penerjemah: Eva Y. N., at all, Cet. I, (Bandung: Mizan, 2001), h. 63.

⁶Arti dari kata suku adalah golongan orang-orang yang seturunan dalam arti masih dalam satu nenek moyangnya. Tim Penyusun Kamus Pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 1099.

⁷Suku Kurdi merupakan suku yang berasal dari penduduk asli Arab yang datang ke Persia dengan membawa berbagai pengaruh didalamnya yaitu pengaruh agama dan budaya yang sangat kuat. Suku Kurdi pindah ke Persia dikarenakan adanya perselisihan antar suku yaitu suku Ghasani dengan suku Semit Arab yang menyebabkan mereka hijrah ke daerah pegunungan Zagros yang berada di Persia dan kemudian mereka bercampur dengan penduduk yang ada disana. Kemudian suku Kurdi mulai melebur di Persia dan bertahan cukup lama disana, sampai akh-

Akan tetapi, hubungan baik diantara keduanya tidak berlangsung lama, dikarenakan suku Kurdi dan pemerintah Republik Turki memiliki ideologi yang berbeda. Salah satunya yaitu suku Kurdi memiliki ideologi nasionalisme yang menginginkan untuk berpisah dari pengawasan pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk dan bersatu dengan suku Kurdi yang berada di beberapa negara (seperti negara Irak, Iran dan Suriah yang bertempat di wilayah Kurdistan) dengan mendirikan sistem pemerintahan yang mandiri.⁸ Sedangkan Ideologi Mustafa Kemal Atatürk yaitu menetapkan republikanisme, sekulerisme, nasionalisme (yang terpisah dari pengawasan ulama dan sultan), populisme dan etatisme dengan tujuan untuk membangun perekonomian dan memodernisasikan budaya yang ada di negara Turki dengan ide-ide Barat.⁹

Dengan adanya perbedaan ideologi, pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk kemudian menetapkan kebijakan

irinya suku Kurdi dinyatakan sebagai suku yang berasal dari rumpun bangsa Indo-Eropa yang memiliki hubungan baik dengan bangsa Iran. TH. Bois, "Kurds, Kurdistan" *The Encyclopaedia of Islam*, New Edition; Vol. V, KHE-MAHI, (Leiden: Tuta Sub Aegide Pallas. E.J. Brill, 1986), h. 449.

⁸Kurdistan merupakan daerah perbatasan empat wilayah yang di tempati oleh suku Kurdi seperti Turki, Iran, Irak dan Suriah, selain itu Kurdistan juga merupakan jembatan awal Timur Tengah yaitu antara Asia Tengah dan pegunungan Caucasus, jembatan inilah yang menghubungkan interaksi masyarakat Kurdi dengan suku-suku lainnya seperti; suku Iran, suku Arab, suku Yunani, suku Yahudi, suku Berber, suku Assyria dan suku Turki. David McDowall, *A Modern History of The Kurds*, Revised Edition, (London: I.B. Tauris, 2005), h. 6.

⁹Suna Kili, *Kemalism in Contemporary Turkey*, International Political Science Review / Revue Internationale de Science Politique, Vol. 1, No. 3, Political Ideology: Its Impact on Contemporary Political Transformations (1980), h. 386-390 diakses: 17/09/2014 23:49.

politik yaitu dihapuskannya sistem Kekhalifahan dan Kesultanan, kemudian digantikan dengan sistem Sekuler di Turki. Sistem Sekuler ini merupakan sistem negara yang mampu memisahkan urusan negara dengan agama dan sistem ini pula dengan perlahan-lahan menghapuskan nilai-nilai keagamaan di Turki serta merubah seluruh kebijakan terdahulu menjadi kebijakan yang modernis yaitu seperti merubah gaya berpakaian suku Kurdi dengan pakaian gaya orang Eropa, kemudian merubah bahasa Kurdi juga diganti dengan bahasa Turki, hukum syari'at Islam diganti dengan hukum Swiss dan Italia, melarang keturunan Kurdi untuk tidak bersekolah dan memaksa perempuan Kurdi untuk menjadi selir dari pejabat-pejabat yang berada di pemerintahan Turki. Kebijakan tersebut secara tidak langsung, telah menghambat eksistensi suku Kurdi baik dalam bidang agama, budaya, ekonomi, sosial dan juga politik.¹⁰

Setelah ditetapkannya kebijakan politik, kemudian suku Kurdi merespon pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk dengan melakukan perlawanan¹¹ yang dianggap sebagai bentuk protesnya terhadap pemerintah. Adapun perlawanan yang dilakukan oleh suku Kurdi berupa perang fisik dan non fisik seperti mengencarkan perang bersenjata, aksi demo besar-besaran dan lain sebagainya. Dari perang fisik maupun non fisik inilah yang berdampak pada kehidupan sosial

¹⁰Erik J. Zürcher, *Sejarah Modern Turki*, h. 220-222.

¹¹Perlawanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti: bentuk, proses, cara, perbuatan melawan, usaha mencegah (menangkis, bertahan), berusaha mengadakan pertentangan. Mengenai hal ini, suku Kurdi berusaha mempertahankan identitasnya yang diperkuat dengan nilai-nilai keagamaan. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 645.

suku Kurdi maupun pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk yang mengalami perubahan.¹²

Dengan mencermati latar belakang di atas, timbullah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi masalah diantaranya sebagai berikut: Bagaimana keadaan suku Kurdi di Turki dalam segi politik, sosial, agama dan budaya sebelum masa pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk? Apa motif dari pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk menetapkan kebijakan baru terhadap suku Kurdi? Apa bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk terhadap suku Kurdi di Turki? Bagaimana respon suku Kurdi terhadap pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk setelah ditetapkan kebijakan baru?

Dari pertanyaan yang telah disebutkan di atas, penulis memiliki tujuan yang berkaitan dengan permasalahan ini yaitu ingin mengetahui faktor penyebab dari adanya kebijakan sehingga memicu suku Kurdi untuk merespon pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Maka dari itu, penulis berusaha mengkaji kebijakan pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk terhadap suku Kurdi di Turki tahun 1923-1938 M untuk diajukan sebagai karya ilmiah. Dengan alasan, hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk membahas dan menjelaskan secara rinci adanya motif ditetapkannya kebijakan pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk terhadap suku Kurdi di Turki, sehingga mengakibatkan suku Kurdi terdiskriminasi.

¹²David McDowall, *A Modern History of The Kurds*, h. 184.

B. Pembahasan

1. Keadaan Politik Suku Kurdi di Turki

Suku Kurdi¹³ merupakan suku yang berasal dari Indo-Eropa¹⁴ yang memiliki hubungan baik dengan bangsa Iran.¹⁵ Keberadaan suku Kurdi di Turki bermula dari diberikannya hibah tanah oleh Khilafah Usmani pada abad ke 15 M yang

¹³Sebutan nama Kurdi berasal dari sebuah prasasti milik bangsa Sumerian pada tahun 2000 sebelum masehi, prasasti tersebut disebut dengan menggunakan kata *Kar-da-ka*. Akan tetapi, setelah melakukan peperangan pada akhir abad 1000 sebelum masehi penyebutan Kurdi diganti oleh bangsa Assiria menjadi *Kur-ti-e*. Penyebutan nama Kurdi dari setiap penguasa yang berbeda menjadi indikasi bahwa penamaan suku Kurdi disesuaikan dengan bahasa yang digunakan serta wilayah yang suku Kurdi tempati dengan suatu pemerintahan. TH. Bois, "Kurds, Kurdistan" *The Encyclopaedia of Islam*, h. 447.

¹⁴Indo-Eropa merupakan penduduk asli Arab yang datang ke Persia pada abad ke 7 M dengan membawa berbagai pengaruh didalamnya yaitu pengaruh agama dan budaya yang sangat kuat. Suku Kurdi pindah ke Persia dikarenakan adanya perselisihan antar suku yaitu suku Gassan (Ghassani Suku Gassan merupakan suku yang mengaku sebagai keturunan Arab Selatan Kuno, yang mana bangsanya telah melarikan diri ke Yaman dan menggantikan keturunan Silih. Kemudian mendirikan kerajaan di Suriah, dan mengembangkan kerajaannya di Damaskus sebelah ujung Utara yang dekat dengan Ma'rib. Keturunan dari suku Gassan menganut agama Kristen dan menjadi bangsa Suriah, kemudian mereka mengadopsi bahasa Aramatik yang merupakan bahasa bangsa Suriah tanpa meninggalkan bahasa Arab yaitu bahasa asli mereka) Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, Terj: R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002), h. 96-97) dengan suku Semit Arab merupakan keturunan Arab yang jumlahnya lebih banyak ketimbang keturunan Yahudi yang mempunyai ciri khas fisik dan mental. *Ibid.*, h. 9) yang menyebabkan mereka hijrah ke daerah pegunungan Zagros yang berada di Persia dan kemudian mereka bercampur dengan penduduk yang ada disana.

¹⁵TH. Bois, "Kurds, Kurdistan" *The Encyclopaedia of Islam*, h. 449.

berada di daerah *Diyarbakir*¹⁶. Ketika itu, Khilafah Usmani dan Khilafah Sa-fawiyah berada pada perang *Chaldiran* yang memperebutkan beberapa wilayah yang ingin dikuasainya. Sehingga suku Kurdi mendapatkan pengakuan secara resmi dari bagian Kekhalifahan Usmani atas kemenangannya.¹⁷

Selain itu, suku Kurdi juga mendapatkan kepercayaan untuk memegang provinsi di beberapa daerah. Sehingga keadaan politik suku Kurdi dengan Kekhalifahan Usmani berjalan dengan baik. Bahkan Khilafah Usmani telah mengerahkan suku Kurdi untuk mengatur masalah perpolitikan yang ada di beberapa provinsi dengan melakukan persebaran penguasa Kurdi di bawah pengawasannya, akan tetapi keadaan tersebut tidak berlangsung lama. Hal ini dikarenakan, pada akhir abad ke 18 M Khilafah Usmani telah mengalami fase kemunduran. Sehingga memutuskan untuk melakukan pembaharuan yaitu dengan melakukan penekanan terhadap tokoh lokal yang berpotensi untuk mengkompensasi Khilafah Usmani yang dipimpin oleh Sultan Salim III (1789-1807 M).¹⁸ Sayangnya, pembaharuan yang diajukan tidak mendapatkan persetujuan dari para ulama, sehingga pembaharuan tersebut tidak berjalan sesuai rencana,

¹⁶Diyarbakir merupakan salah satu daerah yang di tempati oleh suku Kurdi, letaknya berada di tenggara Turki di dataran Basaltic. Nama lamanya yaitu *Amida hitam* yang berasal dari tembok hitam Basalt, disekeliling kota Diyarbakir merupakan kota sangat tua yang berdiri sejak 5000 tahun yang lalu. T. Isikozlu-E.F. Isikozlu, "Diyarbakir" *Encyclopedia Of Modern Asia*, New Edition; Vol. III, H-IRAM, (Leiden: Tuta Sub Aegide Pallas. EJB, 1971), h. 280.

¹⁷Abdullah Ocalan, *War an Peace In Kurdistan (Perspektives For a Political Solution of The Kurdish Question)*, (International Initiative: 2008), h 14-15.

¹⁸David McDowall, *A Modern History of The Kurds*, h. 38.

sampai pada akhirnya Sultan Salim III lengser dari jabatannya dan digantikan oleh Sultan Mahmud II (1808-1839 M).¹⁹

Di awal jabatannya, Sultan Mahmud II memutuskan untuk meneruskan pembaharuan Sultan Salim III yang belum terealisasikan. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan sistem Kekhalifahan Usmani yang berada di ujung pintu kehancuran.²⁰ Akibat dari pembaharuan tersebut, terjadi konflik antar pemimpin Kurdi yang ada di Anatolia (Mir. Muhammad) dengan pemimpin Kurdi yang berada di Tur Abdin sebelah barat Mosul (Mir. Said) tahun 1823 M. Konflik yang terjadi bermula dari pemimpin Kurdi Anatolia memporak-porandakan beberapa daerah yang berada di wilayah Turki untuk memperluas wilayahnya dan menjadikan dirinya sebagai pemimpin Kurdi yang paling berkuasa diantara pemimpin yang lain. Pertikaian yang terjadi diantara kedua pemimpin Kurdi kemudian ditindaklanjuti oleh Sultan Mahmud II melakukan kesepakatan antara pemimpin lokal dengan Kekhalifahan pusat. Tujuan dilakukannya kesepakatan tersebut adalah un-

¹⁹Syafiq A. Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*, h. 91-121. Masa kepemimpinan Sultan Salim III merupakan hal yang tersulit untuk dihadapi, karena fase kemunduran yang dialami Khilafah Usmani berasal dari masalah-masalah internal. Salah satunya yaitu muncul dari pemimpin Kurdi dan pemuka agama yang ada di provinsi pada tahun 1807 M, yang memaksa Sultan Salim III untuk mengakui secara resmi status suku Kurdi sebagai penguasa yang bebas dari jangkauan pemerintahan pusat. Hal ini disebabkan, suku Kurdi menginginkan wilayah terpisah dan pemerintahan secara terpisah dari pemerintahan pusat yang berada di daerah Anatolia Timur di wilayah Turki. Akan tetapi, Sultan Salim III menghiraukannya, karena Sultan lebih memfokuskan urusan Kekhalifahan dari pada urusan Kurdi. David McDowall, *A Modern History of The Kurds*, h. 40.

²⁰Syafiq A. Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*, h. 91-121.

tuk menghindari bertambahnya korban sekaligus sebagai upaya mempertahankan kedaulatan Kekhalifahan Usmani. Kesepakatan tersebut kemudian disetujui oleh Mir Muhammad dan Kekhalifahan.²¹

Walaupun satu persatu permasalahan yang ada di Kekhalifahan dapat diatasi dengan baik oleh Sultan, akan tetapi hal yang paling membuatnya resah yaitu mengatasi permasalahan kemerosotan perekonomian yang disebabkan oleh datangnya pedagang Eropa. Sehingga, Sultan Mahmud II memutuskan untuk menindaklanjutinya dengan cara melakukan sensus penduduk dan survei kepemilikan tanah yang ada di Kurdistan (Kadaster).²² Keseriusan dalam mengatasi masalah tersebut telah membuat Sultan Mahmud II merasa kesulitan untuk memperbaikinya, kemudian Sultan Mahmud II memutuskan untuk melakukan pembaharuan kembali yaitu dengan menyerahkan kewenangan Kekhalifahan pusat kepada daerah-daerah (desentralisasi) yang dibantu oleh kekuatan politik dan komersial Eropa. Keputusan ini sangat tidak disetujui oleh pemimpin Kurdi yang berada di daerah-daerah, karena secara tidak langsung Sultan Mahmud II tidak mempercayakan sistem Kekhalifahan Usmani berada di tangan Kurdi. Hal ini membuat suku Kurdi protes terhadap Sultan Mahmud II dengan melakukan pemberontakan terhadapnya. Akan tetapi Sultan Mahmud II tidak memperdulikannya, karena suku Kurdi bukanlah salah satu kepercayaan lagi.²³

²¹David McDowall, *A Modern History of The Kurds*, h. 41-43.

²²*Ibid.*, h. 39.

²³Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 65. Pada periode ini terjadi krisis pemerintahan yang ada di Mesir, ketika itu Mesir memisahkan diri dari kekuasaan Usmani yang berpusat

Tindakan Sultan Mahmud II berdampak pada keadaan sosial politik suku Kurdi yang ada di Turki. Sehingga keputusan Sultan Mahmud II di tolak mentah-mentah oleh pihak suku Kurdi dengan cara membesar-besarkan penolakannya melalui pemberontakan terhadap Khilafah.²⁴ Pada akhirnya, Kekhalifahan memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan penguasa lokal (suku Kurdi). Karena setiap kali melakukan pembaharuan yang menurut Sultan itu baik demi kepentingan Khilafah, suku Kurdi selalu mengecohkannya dengan melakukan pemberontakan yang disengaja maupun tidak disengaja. Pengusiran paksa pun terjadi pada suku Kurdi yang melakukan pemberontakan. Tidak hanya itu, Kekhalifahan juga merampas hasil pertanian serta peternakannya yang berada di Anatolia Timur guna membantu meringankan beban Khilafah. Sejak saat itu, beberapa petani Kurdi yang tidak ikut andil dalam pemberontakan memutuskan untuk meninggalkan desanya, kemudian menetap di tempat lain dan kembali setelah krisis di Turki mereda.²⁵

Pada akhir abad inilah keadaan sosial, ekonomi, politik dan agama suku Kurdi terlihat tidak baik. Hal ini dikarenakan pembaharuan yang ditetapkan oleh Sultan Mahmud II bertolak belakang dengan ideologi suku Kurdi sehingga suku Kurdi sering melakukan perlawanan terhadapnya. Keinginan Sultan Mahmud II untuk mempertahankan Khilafah Usmani berujung pada kematian

di Istanbul. Mesir memutuskan untuk menjadi otonom daerah, kemudian para Sultan mengirim seorang Pasya Turki untuk menjadi wakil mereka dan memerintah disana. Syafiq A. Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*, h. 92-108.

²⁴Diyarbakir merupakan tempat yang di tinggali oleh suku Kurdi. Erik J. Zurcher, *Sejarah Modern Turki*, h. 38-43.

²⁵*Ibid.*, h. 3.

tahun 1839 M, Sultan wafat karena penyakit TBC. Kemudian Sultan Mahmud II digantikan oleh putra sulungnya Abdul Majid yang memerintah tahun 1839-1861 M.

Masa pemerintahannya merupakan masa reformasi yang bermaslahat, masa ini bisa dikatakan sebagai *Tanzimat*²⁶. Periode inilah yang memberikan perubahan besar terhadap sistem Kekhalifahan secara drastis, karena dalam periode ini terdapat tekanan eksternal berkelanjutan yang mendorongnya untuk melakukan Reformasi internal di bidang hukum dan pemerintahan. Pembaharuan Tanzimat sama halnya dengan pembaharuan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II, dengan mengatasi masalah pada angkatan bersenjata, birokrasi pusat, pemerintahan provinsi, perpajakan, pendidikan dan komunikasi. Bedanya, Sultan Abdul Majid lebih memperhatikan dan memperbaiki masalah-masalah ekonomi dan hukum, dan merubah itu semua secara drastis.²⁷

Selain itu, periode ini juga telah melahirkan bibit-bibit nasionalisme yang memandang program tersebut secara kritis. Adapun bibit-bibit tersebut yaitu gerakan Usmani Muda (1860-1870 M)²⁸

²⁶Tanzimat atau dalam bahasa Turki dikenal dengan *Tanzimat-i Khairiye* yaitu gerakan pembaharuan yang dapat mengatur, menyusun dan memperbaiki. *Ibid.*, h. 57-66.

²⁷*Ibid.*, h. 57-66.

²⁸Usmani muda merupakan golongan intelektual Kekhalifahan Usmani yang menentang kekuasaan Sultan dengan tujuan untuk merubah pemerintahan absolut Kekhalifahan Usmani menjadi pemerintahan konstitusional (yang di atur oleh negara). Salah satu dari pemikir Usmani Muda yaitu Ziya Pasya (1825-1880 M) yaitu anak seorang pegawai Kantor Cukai di Istanbul dan Namik Kemal (1840-1888 M) seorang akademisi yang berasal dari keluarga golongan atas dan oleh karena itu orang tuanya sanggup menyediakan pendidikan khusus baginya di rumah. Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Is-*

dan *Turki Muda* (1889 M)²⁹, keduanya merupakan kelompok intelektual yang memberikan kritik secara lebih baik dan juga terdominasi oleh ide-ide Barat dari berbagai pelatihan birokrasi. Sebenarnya paham politik keduanya dipengaruhi oleh paham sekuler dan revolusioner terhadap ajaran Islam tradisional.³⁰

Ide nasionalisme yang diterapkan pada gerakan Usmani Muda dan Turki Muda dipelopori oleh Mustafa Kemal. Di dalam idenya dikatakan, kemunduran Khilafah Usmani terdapat pada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya yang dapat menyebabkan runtuhnya sistem Khilafah. Maka dari itu, gerakan Usmani Muda dan Turki Muda ingin merubahnya dengan sistem revolusi dan menjadikan wilayah Turki sebagai negara sekuler.³¹ Akan tetapi, pemimpin dari suku Kurdi tidak menginginkan adanya perpisahan antara agama dan negara, karena agama adalah satu-satunya ikatan antara Kurdi dan Turki.³²

Hadirnya Mustafa Kemal di Turki berpengaruh buruk bagi sebagian masyarakat suku Kurdi dan Turki. Karena, rencana Mustafa Kemal Ataturk yang mulanya berniat untuk mengusir orang-lam (*Sejarah Pemikiran dan Gerakan*), (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), h. 105.

²⁹Setelah Usmani Muda runtuh kemudian di bentuk oposisi baru yang dikenal dengan Turki Muda. Ide perjuangan Turki Muda berasal dari pemikiran-pemikiran Ahmet Riza (1859-1931 M), Mehmed Murad (1853-1912 M) dan Pangeran Sabahuddin (1877-1948 M). dari ketiga pemikiran ini mempunyai tujuan yang sama yaitu merubah pemerintahan Kekhalifahan Usmani sebagai pemerintahan konstitusional. *Ibid.*, h. 118-121.

³⁰Syafiq A. Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*, h. 125-131.

³¹*Ibid.*, h. 141-144.

³²Zharmukhamed Zardykh, *Ottoman Kurds of the First World War Era: Reflections in Russian Sources*, Vol. 42, No. 1, (Middle Eastern Studies, 2006), h. 73.

orang Eropa dari Turki malah sebaliknya memicu ketegangan pada tubuh politik Khilafah Usmani pada tahun 1900 M. Hal ini disebabkan, Mustafa Kemal Atatürk mengeluarkan kritik terhadap Kekhalifahan Usmani melalui gerakan Turki Muda 1880 M. Sehingga Kekhalifahan Usmani menyerang kembali dengan mengubah sistem pemerintahannya. Perubahan sistem pemerintahan tersebut berdampak pada masyarakat Kurdi dan Turki yang terpaksa mengungsi dan membentuk kelompok-kelompok yang didedikasikan untuk mengubah sistem atau bahkan menggulingkan Sultan dengan cara paksa.³³

Hal tersebut telah dibuktikan oleh gerakan nasionalisme Kurdi, yang dipelopori oleh Sayyid Nihri atau Badr Khan pada tahun 1902 M. Ketika itu, terjadinya desentralisasi partai yang akan menghancurkan politik Kurdi, sehingga suku Kurdi memisahkan diri dari gerakan Usmani. Gerakan nasionalisme inilah yang mengungkapkan kritiknya terhadap sultan. Sehingga Sultan Abd Hamid merasakan ada banyaknya lawan yang akan menyerangnya. Terutama dari kalangan birokrat dan intelektual yang begitu menyambut konstitusi. Sebenarnya, Sultan ingin memodernisasikan Khilafah Usmani dengan mengikuti sistem pemerintahan Eropa yaitu merencanakan wilayah Turki sebagai Negara sekuler, diawali dengan penutupan sekolah-sekolah Islam dan pidato-pidato dari kalangan agama yaitu tarekat Sufi dan identitas nasional berada di bawah pengawasan Kekhalifahan. Akan tetapi, hal tersebut sangatlah bertentangan dengan suku Kurdi yang mayoritasnya menganut agama Islam, kemudian suku Kurdi dan rakyat Turki menolak sistem yang mengubah Negara Islam menjadi

³³David McDowall, *A Modern History of The Kurds*, (London,: I.B. Tauris, 1997), h. 87-88.

Negara sekuler.³⁴

Untuk menghindari kasus yang terus bermunculan, antisipasi yang dilakukan suku Kurdi yaitu membentuk *Perhimpunan bagi Dukungan dan Kemajuan Rakyat Kurdi (Kurt Teavun ve Terakki Cemiyeti)* pada tahun 1908 M, dengan berpacu pada kegiatan-kegiatan sosial. Pada tahun yang sama (1908) Turki Muda telah melakukan Revolusi terhadap Khilafah Usmani.³⁵

Sejak saat itu, agama dan etnis di Turki menjadi tumpang tindih. Hal ini dikarenakan perlakuan Said Nursi Bitlis terhadap penekanan Kurdi telah menimbulkan kecurigaan Sultan Hamid terhadap dirinya. Keinginan Said Nursi untuk memajukan anak-anak dari keturunan Kurdi begitu kuat, bahkan Said Nursi memperbaiki madrasah dan memberikan pelajaran tentang keagamaan dan kenegaraan, serta mendirikan Universitas Al-Azhar untuk menyediakan pendidikan yang lebih tinggi.³⁶

Setelah beberapa tahun didirikannya perhimpunan Kurdi, Syaikh Abdul Qadir melakukan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa suku Kurdi menginginkan pemerintahan daerah secara terpisah (1910 M) yaitu dengan menyelenggarakan kelompok Harapan Masyarakat Kurdi (*Hiviya Kurdi Jamiyati*). Di dalam kelompok tersebut, suku Kurdi dapat mengekspresikan keinginannya lewat surat kabar mingguan. Begitulah

³⁴David McDowall, *A Modern History of The Kurds*, h. 91.

³⁵Diantara pendirinya adalah Amin Ali Khan Badr, Syaikh Abd al-Qadir dari Nihri dan Muhammad Sharif Pasha, dimana Said Nursi (seorang reformis religius) adalah salah satu anggotanya. Erik J. Zürcher, *Sejarah Modern Turki*, h. 219.

³⁶David McDowall, *A Modern History of The Kurds*, (London,: I.B. Tauris, 1997), h. 93.

keadaan politik suku Kurdi di Turki, dengan lika-liku perjuangan suku Kurdi dalam mempertahankan identitasnya disana, suku Kurdi rela mati-matian untuk mempertahankan keetnisannya.³⁷

A. Sistem Pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk

Sejak terjadinya kemunduran Khilafah Usmani, suku Kurdi telah menuntut haknya sebagai penduduk yang merdeka. Tuntutan suku Kurdi terhadap Khilafah Usmani selalu dihiraukan. Sampai pada akhirnya, setelah perang Dunia I terjadi perpecahan wilayah yang tercantum dalam perjanjian *Sykes-Picot*³⁸ tahun 1916 M menyatakan suku Kurdi yang tinggal di Kurdistan terbagi atas beberapa bagian wilayah diantaranya adalah wilayah Turki sekitar 43%, Iran sekitar 31%, Irak 18% dan bekas Uni Soviet (sekarang ini menjadi negara Armenia dan Azerbaijan) 2%. Dari pembagian wilayah tersebut, suku Kurdi merasa kecewa untuk kedua kalinya.³⁹

³⁷*Ibid.*, h. 94.

³⁸Menurut Ira. M. Lapidus di dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Sosial Ummat Islam* menyebutkan bahwa perjanjian *Sykes-Picot* merupakan janji-janji Eropa terhadap kekuasaan Khilafah Usmani yang berisikan pembagian wilayah Usmani dalam beberapa provinsi Usmani. Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, h. 70-71.

³⁹Adapun isi dari perjanjian *Sykes-Picot* yaitu wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Khilafah Usmani diambil alih oleh Sekutu diantaranya; Perancis (Libanon, bagian barat laut Turki, Syria utara dan Iraq utara), Inggris (mendapatkan wilayah Irak, Arabia yang berbatasan dengan Teluk Persia dan Transjordan, Palestina ditujukan menjadi rezim Internasional), Rusia (mendapatkan wilayah Istanbul dan beberapa bagian timur Anatolia), Italia (dijanjikan mendapatkan wilayah selatan Anatolia). Di dalam pembagian wilayah tersebut, telah berdampak buruk pada suku Kurdi yang tinggal di Kurdistan. Michael M. Gunter, *The Kurdish Question in Perspective*, Vol. 166, World Affairs, Spring 2004, <http://www.kurdipedia.org/>

Ketika kehancuran Khilafah Usmani tidak dapat ditoleransi, setelah perang Dunia I upaya kemerdekaan suku Kurdi di Turki secara konsisten telah ditekan oleh Kemal⁴⁰ yaitu dengan menghancurkan gerakan Kurdi pada tahun 1919 M. Kejadian tersebut telah membuat para pemimpin Kurdi untuk membujuk Mustafa Kemal dengan kuat agar mempertimbangkan kembali permintaan Kurdi. Setelah mempertimbangkannya, Mustafa Kemal mengajukan kebijakan khusus (dalam bentuk proposal) untuk membela persaudaraan Turki dan Kurdi yang berunsur Islam. Isi dari proposal yang diajukan oleh Mustafa Kemal selain dari perlindungannya terhadap rakyat Turki dan Kurdi yaitu pengajuan

[documents/88606/0001.PDF](#), h. 197, diakses: 03/01/2015 22:56. Kurdistan merupakan daerah perbatasan empat wilayah yang di tempati oleh suku Kurdi seperti Turki, Iran, Irak dan Suriah, selain itu Kurdistan juga merupakan jembatan awal Timur Tengah yaitu antara Asia Tengah dan pegunungan Caucasus, jembatan inilah yang menghubungkan interaksi masyarakat Kurdi dengan suku-suku lainnya seperti; suku Iran, suku Arab, suku Yunani, suku Yahudi, suku Berber, suku Assyria dan suku Turki. David McDowall, *A Modern History of The Kurds*, Revised Edition, (London, I.B. Tauris, 2005), h. 6. Akibat dari pembagian wilayah tersebut, telah menjadi keuntungan besar bagi Eropa, keuntungan yang didapatkan oleh Eropa berupa pajak yang dihasilkan dari sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan suku Kurdi. Hal ini dikarenakan wilayah yang di tempati oleh suku Kurdi (Kurdistan) merupakan sumber perekonomian utama dari Kekhalifahan Usmani. Hamit Bozarslan, "Kurds and The Turkish State" *The Cambridge History of Turkey*, Edited by: Resat Kasaba, Vol. 4, Turkey in The Modern World, (New York: The Cambridge University Press, 2008), h. 334.

⁴⁰Kemalis merupakan seorang perwira militer yang ahli politik di Turki yang bergabung dengan gerakan Turki Muda dan telah membentuk "Commite For Union and Progress" C. U. P tahun 1907, yang bertujuan untuk mengambil alih pemerintahan pusat agar tidak jatuh ketangan Sekutu. Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, h. 80.

dirinya untuk menjadi ketua baru dari Majelis Nasional Agung. Pada akhirnya proposal yang diajukan oleh Mustafa Kemal disepakati oleh beberapa golongan seperti gerakan Usmani Muda dan Turki Muda yang mempunyai peran penting di dalamnya. Selain itu, proposal tersebut juga telah disetujui oleh para pejabat yang telah membantu para Sultan dalam mengatasi sistem pemerintahan yang telah hancur.⁴¹

Dari proposal yang diajukan oleh Mustafa Kemal, keinginan suku Kurdi dalam mendirikan kemandirian lokal telah tercapai. Akan tetapi dengan syarat bahwa kemandirian lokal yang diajukan oleh suku Kurdi masih dibawah pengawasan pemerintahan pusat. Mengenai hal ini, suku Kurdi masih merasa tidak puas dengan pengakuan tersebut, karena merasa sukunya belum diakui oleh masyarakat Internasional sehingga suku Kurdi mengajukan tuntutan kembali kepada Sekutu (Inggris, Rusia, Italia, Prancis dan Amerika Serikat) untuk mengadakan perundingan khusus tanpa diketahui oleh Mustafa Kemal yang saat itu menjabat sebagai ketua Majelis Nasional Agung. Hal ini dikarenakan Mustafa Kemal tidak akan menyetujui keputusan dari suku Kurdi dan dikhawatirkan Mustafa Kemal akan melakukan tindakan di luar dugaan, seperti: menekan kembali pada suku Kurdi sehingga suku Kurdi tidak mampu bertindak lebih jauh.⁴²

Tuntutan suku Kurdi untuk mendapatkan kemandirian lokal telah di dukung oleh Presiden Amerika yang

⁴¹George S. Harris, *Ethnic Conflict and The Kurds*, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 433, Ethnic Conflict in the World Today (1977), h. 112.

⁴²<http://www.aljazeera.com/news/europe/2007/10/2008525183331270946.html>

bernama *Woodrow Wilson* tahun 1917 M, dengan menyatakan bahwa minoritas dari kelompok sosial yang bukan dari rakyat Turki masa kekhalifahan Usmani harus yakin dengan kesempatan mereka untuk membangun otonomi daerah tanpa ada gangguan dari bangsa lain.⁴³ Perundingan khusus antara Sekutu (Inggris, Amerika Serikat, Rusia dan Prancis) dan pemimpin Kurdi serta Muhammad VI (cucu dari Sultan Mahmud II) dilakukan melalui perjanjian Sevres tahun 1920 M. Pada perjanjian Sevres ini, suku Kurdi berhasil menjadikan wilayahnya sebagai wilayah merdeka yang menyatakan bahwa “*otonomi telah diberikan kepada Kurdistan*”.⁴⁴

Akan tetapi sebagian dari masyarakat Turki dan gerakan nasionalisme (Turki Muda) tidak menyetujui isi dari perjanjian tersebut, dengan alasan apabila masyarakat Kurdi dibebaskan dari Turki maka sebagian yang tinggal di wilayah tetangga seperti Irak, Iran, Suriah, Armenia, dan Azerbaijan akan menuntut hak mereka masing-masing sehingga menimbulkan pemberontakan antar wilayah. Tidak hanya itu, apabila suku Kurdi di Turki dipisahkan dengan negara Turki maka kekuasaan populasi yang ada di wilayah Turki menjadi sedikit.⁴⁵

⁴³David McDowall, “The Kurdish Question: a historical review” *The Kurds: A Contemporary Overview*, edited by Philip G.Kreyenbroek and Stefan Sperl, (London and New York: Routledge, Taylor and Francis group, 1992), h. 13.

⁴⁴R. R. Kasliwal, *The Foreign Policy Of Turkey Since 1919*, The Indian Journal of Political Science, Vol. 7, No. 1-2, (Indian Political Science Association, 1945), h. 389, diakses: 17/09/2014 23:46.

⁴⁵Isi dari perjanjian Sevres tersebut diantaranya: *pertama*, banyaknya beberapa wilayah yang diotonomkan dalam perjanjian ini diantaranya: wilayah Armenia diberikan status merdeka dibawah pengawasan Internasional, jaminan otonom telah diberikan kepada Kurdistan, pu-

Kenyataannya, hal ini tidak dapat dihindari lagi. Dikarenakan isi dari perjanjian Sevres tersebut telah terlaksana oleh suku Kurdi yang ada di Turki. Kejadian tersebut telah menimbulkan pemberontakan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal terhadap Sultan Muhammad IV dan Sekutu. Hal ini terjadi karena tidak adanya persetujuan pada kedua pihak. Menurut Parker Moon di dalam penelitian R. R. Kasliwal yang berjudul *The Foreign Policy of Turkey Since 1919* menyatakan bahwa: “On 24th April, 1920, the Allies published to the Sultan and his Government the terms of the treaty of Sevres. This treaty was purely one-sided arrangement. Parker Moon calls it “a mosaic of secret treaties, a document in which imperialism was writ large (Pada 24 April 1920, Sekutu mempublikasikan kepada Sultan dan pemerintahannya mengenai ketentuan perjanjian Sevres. Perjanjian ini adalah pengaturan murni sepihak saja. Bahkan Parker Moon menyebutnya “mosaik perjanjian rahasia” yaitu dokumen yang tertulis besar imperialismenya)”⁴⁶

Turki yang dulunya mempunyai cakupan wilayah yang luas, akhirnya tinggal memiliki wilayah kecil pasca per-

lau-pulau Mediterania dilepaskan dari kekuasaan Turki Usmani dan Mesir. Di Asia, Turki memerdekakan Medopotamia (Irak) dan Palestina termasuk Transjordan menjadi mandat Inggris. Suriah dan Hijaz menjadi mandat Perancis. *Kedua*, Tarakia (Smyrna) harus diserahkan kepada Yunani dan Azmir dan berada dibawah administrasi Yunani sampai diselenggarakan perundingan selanjutnya. *Ketiga*, wilayah Anatolia Selatan menjadi milik Italia dan negara Sekutu yang berhak mengawasi perekonomian Turki. *keempat*, daerah penduduknya bukan Turki harus dilepaskan. Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam: Imperium Turki Utsmani*, Cet. I, (Jakarta: Kalam Mulia, 1988), h. 78-79. *Ibid.*, h. 388-389.

⁴⁶*Ibid.*, h. 388.

janjian Sevres yang disahkan oleh pihak Sekutu. Bahkan wilayah Turki dijadikan sasaran melunasi hutang dan ekonomi yang dapat dikendalikan oleh Sekutu. Dari perjanjian itu, Ankara (Mustafa Kemal dan gerakan Turki Muda) tidak menyetujuinya karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan-tujuan politik dan ekonomi yang mendasar dari gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh Turki Muda. Dengan demikian perjanjian terhadap penduduk membawa dualisme kepemimpinan politik. Di dalam perjanjian Sevres, perjanjian ini telah mati akibat dari kurangnya penandatanganan yang berkeinginan untuk melaksanakan ketentuan tersebut.⁴⁷

Mengenai hal ini, Mustafa Kemal memiliki hak untuk mengikuti penandatanganan perjanjian Sevres. Karena ketika itu, Mustafa Kemal telah menjadi pemimpin militer di Turki yang membantu mengurus Khilafah Usmani dalam mengatasi masalah-masalah politik. Selain itu, Mustafa Kemal merupakan orang yang ahli dalam urusan politik dan Mustafa tidak menginginkan Turki sepenuhnya dibawah kendali Sultan dan Sekutu.⁴⁸

Akibatnya Mustafa Kemal mengajukan tuntutan terhadap pemerintah yang berisikan tentang “*pemerintah dapat pulih kembali dengan keutuhan dan kesatuan di Anatolia*”. Tetapi pemerintah tidak menyetujuinya, kemudian pihak pemerintah dan Eropa melakukan penyerbuan

⁴⁷Hasan Kayali, “The Struggle for Independence” *The Cambridge History of Turkey*, Edited by: Resat Kasaba, Vol. 4, Turkey in The Modern World, (New York: The Cambridge University Press, 2008), h. 131.

⁴⁸R. R. Kasliwal, *The Foreign Policy Of Turkey Since 1919*, The Indian Journal of Political Science, Vol. 7, No. 1-2, (Indian Political Science Association, 1945), h. 389, diakses: 17/09/2014 23:46.

terhadap Turki dan menduduki Konstantinopel. Setelah itu, Eropa memberikan hukuman mati kepada Mustafa Kemal. Namun Mustafa Kemal tidak pernah memperdulikannya. Bahkan dia terus melakukan aksi militernya dengan gemilang bersama pasukannya sampai ia berhasil memenangkan pertempuran di Anatolia tahun 1921 M. Usainya kejadian tersebut, Majelis Nasional Agung diadakan pada bulan April 1921 M dengan bertempat di Ankara dengan memutuskan untuk memilih Mustafa Kemal sebagai pemimpin dari Majelis Nasional Agung (*Grand National Assembly*).⁴⁹

Terpilihnya Mustafa Kemal menjadi pemimpin Majelis Nasional Agung bermula dari gerakan perjuangan Nasional (Turki Muda) yang telah membuat paten batas-batas politik dan hukum di Turki untuk membebaskan Turki dari dominasi asing, dengan meletakkan dasar-dasar sebuah negara yang merdeka. Semua peristiwa ini berperan dalam mendefi-

⁴⁹Terlihat jelas bahwa dijadikannya Mustafa Kemal sebagai ketua Majelis Nasional Agung merupakan keputusan yang tepat bagi rakyatnya, karena diantara mereka mendukung Mustafa Kemal sebagai pendiri Turki Modern yang bebas dari jajahan Sekutu. Tidak hanya itu ia telah berhasil mengambil alih sistem pemerintahan Sultan yang berkedudukan di Istanbul pada tanggal 29 Oktober 1923 dan menjadikan Turki sebagai negara Sekuler tahun 1924, kemudian Turki dinyatakan merdeka oleh internasional dengan presiden pertamanya yaitu Mustafa Kemal. Dari situlah Mustafa Kemal diberi gelar oleh rakyatnya sebagai bapaknya Turki (Atatürk). Adapun isi dalam sidang Majelis nasional Agung tersebut ialah, suatu keputusan yang diambil oleh Mustafa Kemal dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, Majelis Nasional Agung berfungsi sebagai badan legislatif sekaligus eksekutif. Majelis negara yang anggotanya dipilih dari Majelis Nasional Agung akan menjalankan tugas pemerintah, ketua Majelis Nasional Agung merangkap sebagai ketua Majelis Negara. Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam: Imperium Turki Utsmani*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1988), h. 79-81.

nisikan identitas nasional Turki.⁵⁰

Setelah dinyatakan sebagai ketua dari Majelis Nasional Agung, Mustafa Kemal memutuskan untuk memproklamkan kemerdekaan Republik Turki pada tanggal 29 Oktober 1923 M, yang bertujuan untuk membangun struktur politik abadi menjadi karakteristik dominan.⁵¹ Saat itu suku Kurdi masih menuntut haknya agar diberikan otonom. Keambisiusan suku Kurdi akan diberikannya otonom terpuskan setelah perjanjian Sevres, dikarenakan saat itu Mustafa Kemal telah meratifikasinya pada perjanjian damai Lausanne⁵² tahun 1923 M.

Pada perjanjian damai Lausanne, Ismet Pasha (Inonu)-lah yang memimpin delegasi Turki di perjanjian tersebut. Inonu dipilih oleh Mustafa Kemal karena ia adalah orang yang bisa diandalkan. Inonu juga merupakan salah satu pendukung Mustafa Kemal di Turki. Dalam pandangan mereka, konferensi ini dimaksud untuk menyesuaikan syarat-syarat dari perjanjian Sevres dengan situasi baru. Di dalam perjanjian ini, masalah yang dirundingkan dibagi ke dalam tiga pokok bahasan: *pertama*, masalah teritorial dan militer, *kedua*, perekonomian dan keuangan dan *ketiga*, posisi orang-orang asing serta kaum mi-

⁵⁰Suna Kili, *Kemalism in Contemporary Turkey*, International Political Science Review / Revue internationale de science politique, Vol. 1, No. 3, Political Ideology: Its Impact on Contemporary Political Transformations (1980), h. 384, diakses: 17/09/2014 23:49.

⁵¹J. Zurcher, *Sejarah Modern Turki*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 215.

⁵²Perjanjian damai Lausanne merupakan perjanjian damai setelah meredanya permusuhan antara pihak Sekutu (Inggris, Perancis, Italia, Amerika Serikat, Rusia dan Yunani) dan Turki yang dilaksanakan di Lausanne. Erik J. Zurcher, *Sejarah Modern Turki*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 206-208.

noritas.

Setelah perjanjian damai Lausanne berjalan dengan baik, kemudian Mustafa Kemal melakukan perubahan besar pada awal pemerintahannya. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan pada ideologi *Kemalis*⁵³ yang diterapkan dalam sistem pemerintahannya di Turki, dengan tujuan utamanya yaitu ingin membangun perekonomian dan memodernisasikan budaya yang ada di negara Turki dengan ide-ide Barat.⁵⁴

Perubahan sistem pemerintahan di Turki telah menjadikan suku Kurdi berada dibawah keputusan. Karena selama ini suku Kurdi telah membantu negara Turki dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Selama sepuluh tahun perjuangan bersenjata Kurdi secara efektif dapat mengimbangi tindakan pemerintahan Turki yang mengedepankan penyelesaian secara militer. Namun secara politis, pemerintahan Turki belum menerima keberadaan identitas suku Kurdi hingga saat ini. Sampai pada akhirnya keputusan Mustafa Kemal dalam melakukan perubahan tersebut telah bu-

⁵³Ideologi Kemalis merupakan ideologi Mustafa Kemal yang ia terapkan terhadap pemerintahan Turki karena ia adalah penggemar dari pemikiran orang Barat. sebelumnya juga ia bersekolah di Barat dan mempelajari pemikiran-pemikiran orang Barat. Maka dari itu ketertarikannya terhadap pemikiran Barat ia terapkan di negara Turki. adapun ideologi Kemalis yaitu Republikanisme (kemerdekaan pada suatu negara), Sekulerisme (pemisahan agama dengan negara), Nasionalisme (berkebangsaan), populisme (pengambil alihan pemerintahan oleh rakyat), etatisme (mementingkan negara daripada rakyat). Suna Kili, *Kemalism in Contemporary Turkey*, International Political Science Review / Revue internationale de science politique, Vol. 1, No. 3, Political Ideology: Its Impact on Contemporary Political Transformations (1980), h. 386-390, diakses: 17/09/2014 23:49.

⁵⁴Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, h. 89.

lat.

A. Kebijakan

Setelah terpilihnya Mustafa Kemal Sebagai presiden Turki, kemudian Mustafa Kemal menetapkan berbagai macam kebijakan yang terbagi dalam dua bagian diantaranya kebijakan umum dan khusus.

1. Kebijakan Umum

Di dalam kebijakan umum ini terdiri atas beberapa keputusan Mustafa Kemal yang sengaja dibuat demi perbaikan sistem pemerintahan Republik Turki. Kebijakan umum ini berlaku bagi seluruh rakyat yang ada di Turki tanpa terkecuali. Adapun bentuk kebijakan yang diproklamasikan oleh Mustafa Kemal diantaranya:

a) Penghapusan Kesultanan dan Kekhalifahan Turki Usmani

Setelah berdirinya Republik Turki, Mustafa Kemal memutuskan untuk melakukan reformasi dan mulai menetapkan ideologi Kemalis di Turki. Hal ini dikarenakan, Mustafa Kemal memiliki tujuan untuk memperkuat otoritas pembangunan bangsa yang sekuler dan mewujudkan partisipasi politik yang dapat membawa perubahan dalam struktur sosial ekonomi negara. Adapun tujuan lain dari reformasi Kemal dan ideologi Kemalisme adalah terwujudnya sebuah negara Turki modern dan masyarakat modern dengan membawa Turki ke tingkat peradaban kontemporer.⁵⁵

Demi pembangunan bangsa yang

⁵⁵Suna Kili, *Kemalism in Contemporary Turkey*, International Political Science Review / Revue internationale de science politique, Vol. 1, No. 3, Political Ideology: Its Impact on Contemporary Political Transformations (1980), h. 385-387, diakses: 17/09/2014 23:49.

sekuler, Mustafa Kemal menetapkan kebijakan politik yaitu menghapus sistem Kekhalifahan Usmani. Penghapusan sistem Kekhalifahan Usmani semata-mata untuk kepentingan negara Turki yang menginginkan perubahan besar. Selain itu, Mustafa Kemal menetapkan kebijakan pada lembaga wakaf dan ulama untuk dialihkan kuasanya kepada kantor urusan agama. Dengan melarang tarekat Sufi untuk melakukan prosesi keagamaannya di negara Turki dan Mustafa Kemal memutuskan untuk menghancurkannya pada tahun 1925 M.⁵⁶

b) Pemberlakuan Sistem Sekuler

Pemberlakuan sistem sekulerisme sebenarnya sudah sejak lama diinginkan oleh gerakan nasionalisme yang anggotanya adalah Mustafa Kemal sendiri. Hal ini baru terwujud setelah Turki memproklamasikan kemerdekaan. Sistem sekulerisme ini ditetapkan bersamaan dengan penghapusan Kekhalifahan Usmani yakni dengan menghilangkan nilai-nilai Islam yang ada di Turki. Selain itu sistem sekuler ini sudah direncanakan sejak Mustafa Kemal bergabung dengan Turki Muda, karena menurutnya agama adalah salah satu faktor penghambat kemajuan negara. Sedangkan kehidupan masyarakat yang tinggal di Turki mayoritasnya adalah menganut agama Islam.

Adapun dorongan sistem sekuler yang paling menonjol dari reformasi Kemalis sebagai berikut: *pertama*, sekularisasi di Turki terbagi dalam bentuk negara, pendidikan, dan hukum yaitu dengan cara menyerang pusat-pusat ke-

⁵⁶Jenny B. White, "Islam and Politics in Contemporary Turkey" *The Cambridge History of Turkey*, Edited by: Resat Kasaba, Vol. 4, Turkey in The Modern World, (New York: The Cambridge University Press, 2008), h. 360.

giatan tradisional dan para ulama yang melembaga. Mengenai hal ini, sistem sekuler dalam bentuk negara menghapus kesultanan dan Kekhalifahan, kemudian diproklamasikannya Republik Turki dan pemberlakuan ketatanegaraan baru di tahun 1922-1924 M. Selain itu, peranan syari'at, hukum suci, secara eksklusif dibatasi pada hukum keluarga dan diberlakukannya undang-undang Perdata Swiss serta undang-undang Pidana Italia pada tahun 1926 M, dengan berisikan tentang pelarangan dalam pembentukan organisasi yang berbasis agama. Lain halnya dengan sistem sekulerisasi dalam bentuk pendidikan yaitu secara langsung berada di bawah kontrol kementerian pendidikan dengan pemberlakuan penyatuan sekolah-sekolah agama dan sekolah negeri.⁵⁷

Kedua, tidak diperbolehkan mengangkat simbol-simbol agama dengan cara menggantikan simbol-simbol keagamaan dengan simbol-simbol peradaban Eropa, seperti; penggantian tutup kepala (turban) dengan topi Eropa tahun 1925 M dan pelarangan dalam menggunakan cadar. Hal ini berlaku bagi kaum wanita dan laki-laki yang ada di Turki. Ketika itu, wanita dilarang memakai kerudung dan digantikan dengan memakai rambut palsu. Kemudian laki-laki yang memakai tutup kepala seperti peci digantikan dengan topi Eropa. Wanita yang memakai cadar mau tidak mau harus dilepas, apabila rakyatnya melakukan protes terhadap pemerintahan, maka mereka akan diungsikan ke negara tetangga.⁵⁸

Pelarangan simbol-simbol agama ini juga diberlakukan oleh Mustafa Kemal

⁵⁷Erik J. Zürcher, *Sejarah Modern Turki*, h. 242.

⁵⁸Jenny B. White, "Islam and Politics in Contemporary Turkey" *The Cambridge History of Turkey*, Edited by: Resat Kasaba, Vol. 4, Turkey in The Modern World, (New York: The Cambridge University Press, 2008), h. 360.

pada jam dan kalender yang diganti dengan jam Eropa.⁵⁹ Selain itu, tahun 1928 M Mustafa Kemal memberlakukan tulisan latin dengan menggantikan tulisan Arab dan juga mulai dilancarkannya pemurnian bahasa Turki dari muatan bahasa Arab dan Persi. Bilangan dan angka-angka juga mengikuti gaya tulisan Eropa. Pada tahun yang sama, Mustafa Kemal mewajibkan warga Turki untuk menggunakan nama panggilan kecil (marga) sebagaimana yang berlaku dengan nama yang ada di Eropa.⁶⁰

Tahun 1931 M, pemberlakuan ukuran takaran dan neraca, hal ini dilakukan untuk membuat komunikasi dunia Eropa menjadi lebih mudah. Hal ini juga merupakan sebuah langkah lain untuk memutuskan keterikatan dengan dunia Islam. Selain itu, tahun 1934 M pemberlakuan nama keluarga dengan hukum Swiss yang menggantikan hukum syari'ah dan tahun 1935 hukum waris laki-laki serta perempuan disamaratakan.⁶¹

Ketiga, pemerintah melakukan serangan terhadap agama Islam yang dianut oleh rakyat dalam bentuk pembatasan hukum. Pembatasan ini dilakukan pada masjid-masjid dan pengurangan khatib (orang yang menyampaikan khotbah) karena sebagian dari mereka diangkat oleh pemerintah. Seorang khutbah Jum'at di dalam penyampaian keagamaan diwajibkan untuk menyampaikan masalah-masalah pertanian dan perdagangan kepada rakyat. Selain itu, rakyat yang menganut agama Islam yang biasanya beribadah di masjid-masjid seperti di masjid Istanbul tidak diperbolehkan oleh pemerintah, kemudian

pemerintah Mustafa Kemal melakukan perubahan pada masjid Aya Sophia untuk dijadikan sebagai Musium dan masjid raya Al-Fatih dijadikan sebagai gudang.⁶²

Dari perubahan inilah keputusan suku Kurdi dalam memperjuangkan identitasnya di negara Turki, apalagi mayoritas dari suku Kurdi menganut agama Islam faham Sunni. Disini mereka dijadikan sebagai alat tawar menawar guna mencapai keberhasilan negara Turki dalam mempertahankan sistem pemerintahannya. Wajar saja apabila suku Kurdi kontra dengan keputusan Mustafa Kemal, yang akhirnya pihak dari suku Kurdi melakukan perlawanan. Selain kebijakan umum, sistem pemerintahan juga memberlakukan kebijakan khusus untuk suku Kurdi yang akan dipaparkan pada sub babnya.

2. Kebijakan Khusus

Kebijakan umum yang telah dipaparkan di atas, jelas bahwa di dalam kebijakan tersebut suku Kurdi dan bangsa lain yang tinggal di Turki kontra terhadap keputusan Mustafa Kemal. Hal ini dikarenakan nilai-nilai agama Islam di Turki secara perlahan telah terhapus dengan sendirinya. Meskipun pemerintah tidak mepedulikan kepentingan rakyatnya, akan tetapi masyarakat Turki menginginkan kepedulian dari seorang pemerintah yang berkuasa. Tidak hanya kebijakan umum yang diberlakukan, akan tetapi kebijakan khusus pun berlaku bagi suku Kurdi diantaranya:

a. Kewarganegaraan Turki (Turkifikasi)

Dalam hal ini, penulis menemukan beberapa masalah yang dinyatakan

⁵⁹Erik J. Zürcher, *Sejarah Modern Turki*, h. 243.

⁶⁰Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam: Imperium Turki Utsmani*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1988), h. 83-84.

⁶¹Erik J. Zürcher, *Sejarah Modern Turki*, h. 243.

⁶²Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, h. 91.

bahwa suku Kurdi sebagai calon warga negara Turki, yang artinya secara tidak langsung suku Kurdi telah diakui keberadaannya oleh pemerintah Republik Turki. Akan tetapi, status Kurdi sebagai negara Turki tidak mudah bagi mereka. Karena status Kurdi dalam komunitas nasional politik Turki telah menimbulkan keraguan bagi rakyat Kurdi. Keraguan tersebut timbul dari hukum-hukum yang telah diubah oleh pemerintah Republik Turki. Maka dari itu, suku Kurdi merasa dirinya telah tertipu dengan hukum-hukum tersebut. Hukum yang diberlakukan oleh pemerintah Republik Turki diantaranya:

Pemberlakuan hukum kewarganegaraan sebagai penanda ke-Turkian dengan menggunakan bahasa Turki secara keseluruhan tanpa terkecuali, diwajibkan seluruh rakyat yang tinggal di Turki memakai hukum Swiss yang telah diterapkan oleh Mustafa Kemal. Mengenai hal ini, rakyat Kurdi yang menganut agama Islam maupun non-Islam merasa dirinya terasimilasi dengan adanya praktek-praktek diskriminatif kewarganegaraan dan pemerintahan tidaklah menganggap serius suku Kurdi sebagai warga negara Turki, karena suku Kurdi masih dianggap sebagai luar lingkaran keturkian yang diharuskan untuk tunduk pada pemerintahan Turki.⁶³

Hal ini dapat dilihat melalui pasal Pasal 88 dari Konstitusi 1924 yang menyatakan : “Rakyat Turki terlepas dari agama dan ras mereka yang dianggap akan kewarganegaraannya di Turki”.⁶⁴

Sebenarnya tujuan utama Republik Turki mengasimilasi suku Kurdi adalah

⁶³Mesut Yegen, *Prospective-Turks or Pseudo-Citizens: Kurds in Turkey*, Middle East Journal, Vol. 63, No. 4 (Autumn, 2009), h. 598, diakses: 06/04/2014 23:04.

⁶⁴Mesut Yegen, h. 606.

tidak ingin dirugikan oleh pihak Kurdi yang memanfaatkan fasilitas sebagai warga negara Turki tanpa pengabdian-nya kepada pemerintah Republik Turki. Oleh karena itu, pemerintahan membuat undang-undang baru tahun 1934 M yang terbagi ke dalam tiga zona yaitu:

- Pemisahan daerah yang dianggap sebagai populasi budaya Turki
- Daerah pemisahan untuk migrasi dan pemukiman penduduk dianggap berasimilasi ke dalam budaya Turki
- Daerah yang dilarang untuk bermukim dengan alasan mementingkan kesehatan rakyat, ekonomi, budaya, politik, militer dan keamanan di Turki

Dideklarasikannya hukum undang-undang tersebut, berdampak buruk bagi populasi rakyat Turki. Sehingga data yang diperoleh menunjukkan adanya jumlah dari keseluruhan dari rakyat Turki yaitu 25.381 dan jumlah rakyat Kurdi sekitar 5.074 yang berumah tangga di provinsi Kurdi seperti di Tunceli, Erzincan, Bitlis, Siirt, Van, Diyarbakir, Ago, Mus, Erzurum, Elazig, Kars, Malatya, dan Mardin. Suku Kurdi di Turki mulai mengungsi dan menetap dibagian Barat Turki.⁶⁵

b. Pembatasan Ruang Gerak Suku Kurdi

Adapun praktek-praktek diskriminasi pemerintah Republik Turki terhadap suku Kurdi yaitu membatasi ruang gerak Kurdi di Turki, dengan memaksa rakyat Kurdi untuk bekerja sebagai buruh dan menjadikan wanita dari keturunan Kurdi sebagai selir di pemerintahan. Selain

⁶⁵Mesut Yegen, h. 603.

itu, anak-anak dari keturunan Kurdi tidak diperbolehkan untuk bersekolah di Turki.⁶⁶

Walau bagaimanapun, kehidupan suku Kurdi di Turki harus dipertahankan. Karena keinginan untuk menuntut haknya menjadi negara yang merdeka akan sia-sia. Meskipun pemerintah telah berlaku keras terhadap agama dan rakyatnya, akan tetapi suku Kurdi harus dengan sabar menghadapi masalah ini. Setelah bertahun-tahun suku Kurdi menuntut haknya, hal ini telah ditolak oleh pemerintahan berkali-kali, kemudian Mustafa Kemal mendeklarasikan undang-undang baru yaitu dengan menyelenggarakan pemeliharaan ketertiban untuk menekan pers dan menutup partai politik oposisi dan partai Republik progresif. Jika hal ini dilakukan oleh Mustafa Kemal, otomatis sangat kecil kemungkinan suku Kurdi untuk meminta otonomi.⁶⁷

C. Penutup

Sejak Pemerintah Mustafa Kemal Ataturk menetapkan kebijakan politik terhadap suku Kurdi di Turki, timbulnya kesenjangan ideologi dan agama yang sangat kuat antara suku Kurdi dan pemerintahan Mustafa Kemal. Sehingga hal tersebut menjadi penghambat eksistensi suku Kurdi baik dalam bidang sosial, ekonomi, agama, budaya dan politik. Selain itu, identitas suku Kurdi juga merasa terancam karena dirinya terdiskriminasi oleh pemerintah Musta-

fa Kemal Ataturk.

Dengan adanya bentuk kebijakan politik yang ditetapkan oleh pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk seperti: penghapusan sistem Kekhalifahan Usmani diganti dengan sistem sekularisasi, hukum Syari'ah Islam di ganti dengan hukum Swiss dan Italia, dan juga dilakukannya peleburan etnis yang tinggal di Turki menjadi rakyat Turki (kewarganegaraan Turki). Hal tersebut menyebabkan ruang gerak suku Kurdi dibatasi dalam segi politik, ekonomi, budaya dan agama. Sehingga kondisi suku Kurdi di Turki menjadi tidak karuan, seperti hilangnya tempat tinggal, hanya kemiskinan dan kelaparan yang dirasakan oleh suku Kurdi. Selain itu, hilangnya harapan yang dialami oleh suku Kurdi. Sampai pada akhirnya, kelompok perhimpunan Azadi dengan para pendiri dan anggotanya memutuskan untuk melakukan perlawanan secara fisik dan non fisik.

Adapun secara fisik, suku Kurdi menggencarkan perang militer dengan mengerahkan pasukannya, melakukan pemboman terhadap pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk. Aksi demo besar-besaran yang dilakukan oleh para mahasiswa dan para anggota Kurdi yang berada di ibu kota Istanbul. Secara non fisik, suku Kurdi melakukan aksi demo tertulis dengan menjelek-jelekan Mustafa Kemal Ataturk di media cetak seperti: Koran, Majalah, artikel dan lain sebagainya. Sehingga saluran media cetak pun di cabut oleh pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk.

Daftar Pustaka

Buku:

Ahmad, Feroz. "Turki" *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. John

⁶⁶David Bradshaw, *After the Gulf War: The Kurds*, The Middle East Journal, (Published by: Royal Institute of International Affairs), (Middle East: 1991), h. 79.

⁶⁷Jenny B. White, "Islam and Politics in Contemporary Turkey" *The Cambridge History of Turkey*, Edited by: Resat Kesaba, Vol. 4, Turkey in Modern World, (New York: Cambridge University Press, 2008), h. 361.

- L. Esposito; Terj: Eva Y. N., at all. Bandung: Mizan, 2001.
- Bois, TH. "Kurds, Kurdistan" *The Encyclopaedia of Islam*. New Edition; Vol. V, KHE-MAHI, Leiden: Tuta Sub Aegide Pallas. E.J. Brill, 1986.
- Bozarslan, Hamit. "Kurds and The Turkish State" *The Cambridge History of Turkey*. Edited by: Resat Kasaba, Vol. 4, Turkey in The Modern World, New York: The Cambridge University Press, 2008.
- Bradshaw, David. *After the Gulf War: The Kurds*. The Middle East Journal. Published by: Royal Institute of International Affairs. Middle East: 1991.
- Gunter, Michael M. *The Kurdish Question in Perspective*. Vol. 166, World Affairs, Spring 2004,
- Harris, George S. *Ethnic Conflict and The Kurds*. Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 433. Ethnic Conflict in the World Today 1977.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs*. Terj: R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002.
- Isikozlu, T. - Isikozlu, E.F. "Diyarbakir" *Encyclopedia Of Modern Asia*, New Edition; Vol. III, H-IRAM. Leiden: Tuta Sub Aegide Pallas. EJB, 1971.
- Kasliwal, R. R. *The Foreign Policy Of Turkey Since 1919*. The Indian Journal of Political Science. Vol. 7, No. 1-2. Indian Political Science Association, 1945.
- Kayali, Hasan. "The Struggle for Independence" *The Cambridge History of Turkey*, Edited by: Resat Kasaba. Vol. 4, Turkey in The Modern World. New York: The Cambridge University Press, 2008.
- Kili, Suna. *Kemalism in Contemporary Turkey*. International Political Science Review / Revue Internationale de Science Politique, Vol. 1, No. 3, Political Ideology: Its Impact on Contemporary Political Transformations 1980.
- Lapidus, Ira. M. *Sejarah Sosial Ummat Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- McDowall, David. "The Kurdish Question: a historical review" *The Kurds: A Contemporary Overview*. edited by Philip G.Kreyenbroek and Stefan Sperl. London and New York: Routledge, Taylor and francis group, 1992.
- McDowall, David. *A Modern History of The Kurds*. London,: I.B. Tauris, 2005.
- Mughni, Syafiq A. *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*. Jakarta: Logos, 1997.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan)*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992.
- Ocalan, Abdullah. *War an Peace In Kurdistan (Perspektives For a Political Solution of The Kurdish Question)*. International Initiative: 2008.
- Syalabi, Ahmad. *Sejarah dan Kebu-*

dayaan Islam: Imperium Turki Utsmani. Jakarta: Kalam Mulia, 1988.

Tim Penyusun Kamus Pusat bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

White, Jenny B. "Islam and Politics in Contemporary Turkey" *The Cambridge History of Turkey*. Edited by: Resat Kesaba, Vol. 4, Turkey in Modern World. New York: Cambridge University Press, 2008.

Yegen, Mesut. *Prospective-Turks or Pseudo-Citizens*, Kurds in Turkey. Middle East Journal, Vol. 63, No. 4 Autumn, 2009.

Zardykhan, Zharmukhamed. *Ottoman Kurds of the First World War Era: Reflections in Russian Sources*. Vol. 42, No. 1, Middle Eastern Studies, 2006.

Zurcher, Erik J. *Sejarah Modern Turki*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Internet:

<http://www.aljazeera.com/news/europe/2007/10/2008525183331270946.html>. Akses: 05 Desember 2014 pukul 09:30 WIB.

<http://www.kurdipedia.org/documents/88606/0001.PDF>. Akses: 03 Januari 2015 pukul 22:56 WIB.

